



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2021**



Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam  
Telepon (0717) 434693, 4262686 Pangkalpinang 33418 email: [inspektoratbabel@gmail.com](mailto:inspektoratbabel@gmail.com)





# **RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dalam RPJMD 2017-2022 dan menyelaraskan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, khususnya dalam bidang pengawasan maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan pelaksanaan tahun keempat Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 berpedoman pada Renstra Perubahan Inspektorat Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Dalam Negeri dan dipadukan dengan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota.

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan dalam membantu tugas Gubernur di bidang pengawasan, sebagaimana Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan

unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tugas-tugas pendukung dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakannya memiliki peran strategi dan signifikan dalam menciptakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan pelayanan publik yang semakin berkualitas, bersih, responsif dan profesional. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan tersebut telah ditetapkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah Inspektorat dalam Dokumen Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 sebagai Perencanaan Kerja Jangka Menengah lima tahunan dan Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2021 yang terukur jelas sebagai dukungan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Inspektorat Daerah yang meliputi:

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
2. Orientasi mengenai Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Secara keseluruhan proses penyusunan Renja meliputi beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Perumusan rancangan awal;

- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan Renja dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan dan sasaran kepala perangkat daerah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan perangkat daerah;
2. memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RENSTRA perangkat daerah sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah hingga tahun berkenaan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- n. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 03 Seri D);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

- a. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 dimaksudkan sebagai wujud dukungan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan pelaksanaan

program pembangunan tahun ke empat RPJMD Tahun 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui penyusunan program kegiatan berbasis kinerja .

- b. Secara umum mekanisme perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan mengacu pada program yang akan dilaksanakan perangkat daerah (*money follow program*), bukan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah (*money follow function*) guna mencapai target program/kegiatan yang sudah ditetapkan.

### **1.3.2. Tujuan**

- a. Mengakomodir strategi perencanaan pembangunan untuk pendanaan program prioritas Nasional dan Program prioritas Provinsi Bangka Belitung Tahun 2021 pada Inspektorat Daerah.
- b. Menyelaraskan dan mensinergikan program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan program unggulan pembangunan prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2017-2022 sebagaimana visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RPJMD Tahun 2017 - 2022 yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah pada RKPD 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan sistematika penulisan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**



Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lain yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja Utama yang sudah ditentukan dalam NSPK dan RPJMD serta

Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

### 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang harus ditindaklanjuti.

### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

## BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

## BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## BAB V : PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Dalam rangka memaksimalkan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka dilakukan reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu s.d. tahun 2020 dan hasil capaian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun berjalan sampai dengan periode Triwulan I Tahun Anggaran 2020 yang telah direalisasikan melalui penetapan program/kegiatan di dalamnya yang mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan mengakomodir program prioritas daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2017-2022.

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Pada tahun 2020 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan 4 (empat) program dengan 23 (dua puluh kegiatan) kegiatan, dan terjadi penurunan dari tahun 2019 sebelumnya dengan 4 (empat) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan, yang terbagi dalam 1 (satu) program rutin dengan 5 (lima) Kegiatan, dan 3 (tiga) program pembangunan strategis dengan 18 (delapan belas) kegiatan sesuai kewenangan Inspektorat Daerah.

Pada tahun 2020 dilakukan perubahan terhadap RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017- 2022 dan Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 dalam rangka untuk meningkatkan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta terkait beberapa regulasi mengalami perubahan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(104)
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dg tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	1 Dokumen	25%
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	2 Laporan	28,57%
	<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan aparatur</b>	<b>Prosentase tingkat capaian OPD dengan Laporan Kinerja BAIK (%)</b>	<b>80</b>	<b>97,05</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov.Kep. Bangka Belitung	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%	4 Laporan	0 Laporan	0%
	Pembinaan dan Penyusunan Pelaporan e-LHKPN	Persentase Kepatuhan Pelaporan	100%					100%	95%	95%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(104)
	Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan RAD PPK	4 laporan		4 laporan	-	50%	4 laporan	1 Laporan	25%
	Penanganan Whistle Blower System	Jumlah laporan WBS	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	25%
	Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lakip dan EKPPD/LPPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	1 Dokumen	12,5%
	Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah laporan penilaian Internal Zona Integritas	5 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	5 unit kerja	0	0%
	Monev Laporan Gratifikasi	Jumlah laporan monev gratifikasi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	0	0%
	<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		<b>Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti (%)</b>	<b>95%</b>	<b>90,68%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>		
		<b>Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah (%)</b>	<b>98%</b>	<b>88,62%</b>	<b>94%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(104)
	Penyelesaian TP-TGR oleh Majelis dan Sekretariat TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah	Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	20%	15%	15%	15%	100%	15%	2%	13,34%
	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah PD yang diawasi terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan (SPI dan Kepatuhan) dan Pemeriksaan Kinerja	160 obrik	150 obrik	150 obrik	150 obrik	100%	150 Obrik	24 Obrik	16%
	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan	2 rakor 1 PKPT	2 rakor 1 PKPT	2 rakor 1 PKPT	2 rakor 1 PKPT	100%	2 rakor 1 PKPT	0	0%
	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas penyelesaian Rekomendasi LHP Pengawasan Internal, APIP dan BPK	160 obrik	150 obrik	150 obrik	145 obrik	96,66%	150 obrik	20 obrik	13,34%
	Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	0	0%
	Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas Pemeriksaan APIP dan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcomes</i> )/ Kegiatan ( <i>output</i> )	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(104)
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Jumlah pengaduan kasus yang ditindak lanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah (laporan pengaduan)	20	1	15	9	60%	15 laporan pengaduan	2 laporan	13,34%
	Bimbingan Teknis E- LHKPN	Jumlah peserta bimtek E- LHKPN			300	100	33,34%			
	<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan sosial, Ekonomi dan Budaya</b>	<b>Peningkatan Capaian Level Maturitas SPIP (level)</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,023</b>	<b>100%</b>			
		<b>Peningkatan capaian Level Kapabilitas APIP (level)</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>100%</b>			
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang terlayani dalam sisatgas SPIP	42 PD	42 PD	42 PD	42 PD	100%	42 PD	0	0%
	Konsultasi Audit	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	42 PD		42 PD	42 PD	100%			
	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat SPIP (Peserta)	100,00		100,00			100	0	0%
	Monitoring/pemantauan dan evaluasi SPIP	Jumlah monitoring dan evaluasi SPIP (kali)	4		4	4	100%			
	Survey Penilaian Integritas	Nilai Survey Penilaian Integritas						80%	0	0%

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tugas pokok yang dititikberatkan pada sasaran dan program strategisnya dengan indikator masing-masing. Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari tabel analisis dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Renja Perangkat Daerah  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

[illegible]

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.**

Perubahan sistem manajemen pemerintahan daerah dan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah memberikan perubahan paradigma tugas pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku APIP. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menekankan arti pentingnya Sistem Pengawasan Intern dalam rangka penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola keuangan berdasarkan prinsi *good governance*.

Sejalan dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pentingnya sistem pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Isu strategis pembinaan dan pengawasan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis ditetapkan melalui pengkajian atas permasalahan pembinaan dan pengawasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan peningkatan pelayanan publik dari masyarakat;



2. Tuntutan kepada perangkat daerah untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP;
3. Tuntutan adaptasi dan penerapan kemajuan teknologi informasi di lingkungan kerja;
4. Tuntutan peningkatan Kapabilitas APIP;
5. Tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
6. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan terformulasinya isu-isu tersebut di atas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan membandingkan data rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

1. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
2. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

Tabel T-C.31.  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Pangkalpinang	Nilai Sakip PD	80	23.640.550	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Pangkalpinang	Nilai Sakip PD	80	20.306.537	
1.1	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Jumlah dok perencanaan dan evaluasi</b>	<b>10</b>	<b>340.000</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Jumlah dok perencanaan dan evaluasi</b>	14 dokumen	<b>272.000</b>	
1.1.1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	2 dokumen	100.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	2 dokumen	80.000	
1.1.2	Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Pangkalpinang	Jumlah RKA/DPA yang tersusun	4 Dokumen	50.000	Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Pangkalpinang	Jumlah DPA/DPPA yang tersusun	4 dokumen	40.000	
1.1.3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah dok evaluasi PD (DALEV)	4 Dokumen	30.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD	4 dokumen	24.000	
1.1.4	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Pangkalpinang	jumlah kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 PKPT	100.000	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Pangkalpinang	jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	1 dokumen	80.000	
1.1.5	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah dok Evaluasi kinerja PD (LKPJ, LAKIP, LPPD dan ATA)	3 Dokumen	60.000	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD	3 dokumen	48.000	
1.2	<b>Adminstrasi Keuangan</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Survey kepuasan pelayanan keuangan</b>	<b>95</b>	<b>17.680.000</b>	<b>Adminstrasi Keuangan</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Survey kepuasan pelayanan keuangan</b>	<b>95</b>	<b>17.672.000</b>	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkalpinang	Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan	88	17.640.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkalpinang	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	88 orang	17.640.000	
1.2.2	Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran	Pangkalpinang	Jumlah laporan keuangan bulanan Semesteran	2	25.000	Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran	Pangkalpinang	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Semesteran	14 laporan	20.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pangkalpinang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	15.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pangkalpinang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	12.000	
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Survey kepuasan pelayanan internal</b>	<b>95</b>	<b>2.605.550</b>	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Pangkalpinang</b>	<b>Survey kepuasan pelayanan internal</b>	<b>95</b>	<b>2.242.537</b>	
1.3.1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Pangkalpinang	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	12	20.000	Penyediaan Jasa surat menyurat	Pangkalpinang	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	300 Surat/Barang yang dikirim	16.000	
			Jumlah Materai	1.600	9.300			Jumlah Materai	4500 lembar	7.440	
								Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	7 orang	263.900	
1.3.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pangkalpinang	Jumlah tagihan listrik	12	156.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pangkalpinang	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	12 bulan	170.337	
			Jumlah tagihan komunikasi	12	60.000						
1.3.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pangkalpinang	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	45	50.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pangkalpinang	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	45 kali	40.000	
								Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	4 orang	150.800	
1.3.4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Pangkalpinang	Jumlah pegawai non PNS yang memiliki jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan (orang)	19	37.050						
		Pangkalpinang	Jumlah pegawai non PNS yang memiliki jaminan ketenagakerjaan (orang)	19	22.800						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pangkalpinang	Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor (orang)	4	150.800						
1.3.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pangkalpinang	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	4	15.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pangkalpinang	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	4 unit	12.000	1 unit mobil jabatan, 1 unit Mobil Operasional, 2 unit Kendaraan Roda 2
			Jumlah tenaga sopir	2	75.400			Jumlah tenaga sopir	1 orang	37.700	
1.3.5	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Pangkalpinang	Jumlah pengelola administrasi keuangan	8	55.250	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Pangkalpinang	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	12 orang	44.200	PA, KPA, PPK, Bendahara, Pengurus Barang dll
			Jumlah Pramubakti	6	226.200						
1.3.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pangkalpinang	Jumlah tenaga kebersihan	7	263.900	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pangkalpinang	Jumlah tenaga kebersihan/ pramubakti	7 orang	263.900	
			Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor	35	50.000			Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	70 jenis	40.000	
1.3.7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pangkalpinang	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	79	50.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pangkalpinang	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	79 jenis	40.000	
1.3.8	Penyediaan alat tulis kantor	Pangkalpinang	jumlah jenis ATK yang dibeli	85	120.000	Penyediaan alat tulis kantor	Pangkalpinang	jumlah jenis ATK yang dibeli	85 jenis	80.000	
1.3.9	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Pangkalpinang	jumlah barang cetak	13	50.000	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Pangkalpinang	jumlah barang cetak	13 eksemplar	50.000	
			Jumlah penggandaan	15.000	5.250			Jumlah penggandaan	15.000 lembar	5.250	
1.3.10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pangkalpinang	Jumlah komponen instalasi listrik	30	20.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pangkalpinang	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	30 jenis	16.000	
1.3.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pangkalpinang	Jumlah Jenis peralatan kantor	40	200.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pangkalpinang	jumlah peralatan dan perlengkapan	40 jenis	80.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								kantor yang tersedia			
1.3.12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pangkalpinang	Jumlah peralatan rumah tangga	1	2.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pangkalpinang	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 unit	2.000	
1.3.13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pangkalpinang	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	5	20.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pangkalpinang	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	5 eksemplar	16.000	
1.3.14	Penyediaan makan dan minum	Pangkalpinang	Jumlah makan dan minum Tamu	36	62.400	Penyediaan makan dan minum	Pangkalpinang	Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	36 Pax	49.920	
			Jumlah makan dan minum rapat	48	105.000			Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	48 Pax	64.000	
1.3.15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pangkalpinang	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah	36	400.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Pangkalpinang	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	36 kali	280.000	
			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	36	100.000			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	36 kali	80.000	
1.3.16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pangkalpinang	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	14	50.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pangkalpinang	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	14 jenis	40.000	
1.3.17	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pangkalpinang	Jumlah peralatan gedung kantor	12	25.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pangkalpinang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	12 jenis	20.000	
1.3.18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pangkalpinang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	12	150.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pangkalpinang	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	80.000	
1.3.19	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pangkalpinang	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	12	30.000	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Pangkalpinang	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 unit	24.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional	Pangkalpinang	Jumlah kendaraan oprasional yang dipelihara	36	40.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional	Pangkalpinang	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	3 unit	92.000	
		Pangkalpinang	Jumlah BBM kendaraan	84	75.000						
1.3.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pangkalpinang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	60	100.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pangkalpinang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	60 unit	40.000	
1.3.22	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pangkalpinang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	36	135.936	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pangkalpinang	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	36 unit	60.000	
		Pangkalpinang	Jumlah BBM Genset	12	7.200		Pangkalpinang	Jumlah BBM Genset	750 liter	7.200	
1.4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pangkalpinang	Survey kepuasan pelayanan kepegawaian	95	200.000	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pangkalpinang	Survey kepuasan pelayanan kepegawaian	95	191.850	
1.4.1	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pangkalpinang	Pendidikan dan pelatihan formal	88	200.000	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pangkalpinang	jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	88 orang	120.000	
								Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	88 orang	71.850	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang DKI Jakarta	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan	<5%	4.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang DKI Jakarta	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan	<5%	4.500.000	
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka,	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka,	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	100%	1.280.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang DKI Jakarta	Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan)				Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang DKI Jakarta	internal meliputi Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan)			
2.1.1	Audit Kinerja dan Keuangan					Audit Kinerja dan Keuangan					
		Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	40 Laporan	525.000		Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	40 Laporan	120.000	
		DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40 Laporan	550.000		DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	40 Laporan	136.000	
		Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	40 Laporan	525.000		Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	40 Laporan	120.000	
2.1.2	Review Kinerja dan Keuangan				900.000	Review Kinerja dan Keuangan				480.000	
		Pangkalpinang	Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	34 laporan	300.000		Pangkalpinang	Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	34 laporan	120.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pangkalpinang	Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34 laporan	300.000		Pangkalpinang	Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34 laporan	120.000	
		Pangkalpinang	Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	34 laporan	300.000		Pangkalpinang	Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	34 laporan	120.000	
2.1.3	Pemantauan Kinerja dan Keuangan				625.000	Pemantauan Kinerja dan Keuangan				484.000	
		Pangkalpinang	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	20 Laporan	200.000		Pangkalpinang	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	20 Laporan	120.000	
		Pangkalpinang	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20 Laporan	225.000		Pangkalpinang	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	20 Laporan	124.000	
		Pangkalpinang	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	20 Laporan	200.000		Pangkalpinang	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	20 Laporan	120.000	
2.1.4	Evaluasi Kinerja dan Keuangan				300.000						
		Pangkalpinang	Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	12 Laporan	100.000		Pangkalpinang	Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	12 Laporan	60.000	
		Pangkalpinang	Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pengelolaan	13 Laporan	100.000		Pangkalpinang	Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang	13 Laporan	60.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Keuangan dan Aset Daerah					Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
		Pangkalpinang	Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	13 Laporan	100.000		Pangkalpinang	Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	13 Laporan	60.000	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu meliputi Audit Kinerja dan Keuangan	100%	400.000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu meliputi Audit Kinerja dan Keuangan	100%	200.000	
2.2.1	Audit Kinerja dan Keuangan	DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigatif	100%	200.000	Audit Kinerja dan Keuangan	DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigatif	100%	100.000	
		DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Pengawasan Lainnya Bidang Investigatif	100%	200.000		DKI Jakarta, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkalpinang	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Pengawasan Lainnya Bidang Investigatif	100%	100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pangkalpinang	Level Capaian Maturitas SPIP	3	425.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pangkalpinang	Level Capaian Maturitas SPIP	3	240.000	
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Pangkalpinang	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	100%	100.000	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Pangkalpinang	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan	100%	80.000	
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Pangkalpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 dokumen	25.000	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Pangkalpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 dokumen	20.000	
		Pangkalpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 dokumen	25.000		Pangkalpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 dokumen	20.000	
		Pangkalpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	2 dokumen	25.000		Pangkalpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	2 dokumen	20.000	
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang	2 dokumen	25.000		Pangkalpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2 dokumen	20.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dirumuskan Bidang Investigatif					yang dirumuskan Bidang Investigatif			
3.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pangkalpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 dokumen	50.000	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pangkalpinang	Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur	12 dokumen	20.000	
		Pangkalpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2 dokumen	50.000		Pangkalpinang	Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12 dokumen	20.000	
		Pangkalpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	2 dokumen	50.000		Pangkalpinang	Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	12 dokumen	20.000	
		Pangkalpinang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Investigatif	2 dokumen	175.000		Pangkalpinang	Jumlah Sistem Informasi Pengawasan	1 aplikasi	100.000	
			<b>Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan (Bobot 12)</b>	<b>6</b>							
3.2	Asistensi dan Pendampingan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, DKI	Persentase Asistensi dan Pendampingan yang dilaksanakan	100%	985.000	Asistensi dan Pendampingan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, DKI	Persentase Asistensi dan Pendampingan yang dilaksanakan	100%	620.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Jakarta, Pangkalpinang</b>					<b>Jakarta, Pangkalpinang</b>				
3.2.1	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, DKI Jakarta, Pangkalpinang	Persentase Pengaduan Masyarakat ditindak lanjuti	100%	200.000	Sub Kegiatan: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, DKI Jakarta, Pangkalpinang	Persentase Pengaduan Masyarakat ditindak lanjuti	100%	120.000	
3.2.2	Asistensi dan Pendampingan	Pangkalpinang	Persentase Kepatuhan Laporan e-LHPKN	100%	100.000	Asistensi dan Pendampingan	Pangkalpinang	Persentase Kepatuhan Laporan e-LHPKN	100%	80.000	
		Pangkalpinang	Persentase Kepatuhan Laporan LHKASN	100%	100.000		Pangkalpinang	Persentase Kepatuhan Laporan LHKASN	100%	80.000	
		Pangkalpinang	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli	2 Laporan	100.000		Pangkalpinang	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli	2 Laporan	80.000	
		Pangkalpinang	Persentase Penyelesaian Laporan dalam Sistem Monitoring Center and Prevention Korsupgah KPK	100%	50.000		Pangkalpinang	Persentase Penyelesaian Laporan dalam Sistem Monitoring Center and Prevention Korsupgah KPK	100%	20.000	
		Pangkalpinang	Persentase Penyelesaian Laporan dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (jaga.id)	100%	50.000		Pangkalpinang	Persentase Penyelesaian Laporan dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (jaga.id)	100%	20.000	
		Pangkalpinang	Persentase Capaian Nilai PMPRB Area Penguatan Pengawasan	85%	50.000		Pangkalpinang	Persentase Capaian Nilai PMPRB Area Penguatan Pengawasan	85%	20.000	
		Pangkalpinang	Jumlah unit Kerja yang diusulkan untuk Zona Integritas	2 Unit	50.000		Pangkalpinang	Jumlah unit Kerja yang diusulkan untuk Zona Integritas	2 Unit	20.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan (setelah pembahasan)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pangkalpinang	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	34 PD	60.000		Pangkalpinang	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	34 PD	40.000	
		Pangkalpinang	Persentase Tindak Lanjut atas Pengaduan melalui Whistle Blowing System	100%	50.000		Pangkalpinang	Persentase Tindak Lanjut atas Pengaduan melalui Whistle Blowing System	100%	20.000	
		Pangkalpinang	Jumlah Laporan Gratifikasi	4 Laporan	50.000		Pangkalpinang	Jumlah Laporan Gratifikasi	4 Laporan	20.000	
		Pangkalpinang	Persentase penyelesaian Kerugian Daerah	20%	125.000		Pangkalpinang	Persentase penyelesaian Kerugian Daerah	20%	100.000	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat umum, terkecuali jika ada pengaduan dari masyarakat yang harus mendapat perhatian dan tindakan lebih lanjut atas perintah Gubernur. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 Inspektorat Daerah tidak dilakukan tahapan forum/rapat koordinasi teknis Perangkat Daerah dengan pertimbangan efisiensi anggaran, namun usulan program/kegiatan dari seluruh pihak masih dapat disampaikan dan dibahas melalui beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain dalam kegiatan Forum Gabungan/Rakortek/Forum Konsultasi Publik/Pramusrenbang/Musrenbang. Adapun usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan yang menjadi bahan pembahasan Renja tahun 2021, secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel T-C.32.  
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku  
Kepentingan Tahun 2021  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Prov.Kep. Babel	<b>Nilai Sakip PD</b>		
	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Prov.Kep. Babel	<b>Jumlah dok perencanaan dan evaluasi</b>		
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Prov.Kep. Babel	Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD		
	Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Prov.Kep. Babel	Jumlah DPA/DPPA yang tersusun		
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Prov.Kep. Babel	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD		
	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Prov.Kep. Babel	jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD		
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Prov.Kep. Babel	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD		
	<b>Adminstrasi Keuangan</b>	Prov.Kep. Babel	<b>Survey kepuasan pelayanan keuangan</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov.Kep. Babel	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan		
	Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran	Prov.Kep. Babel	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Semesteran		
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Prov.Kep. Babel	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		
	<b>Administrasi Umum</b>	Prov.Kep. Babel	<b>Survey kepuasan pelayanan internal</b>		
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Prov.Kep. Babel	Jumlah Surat/Barang yang dikirim		
		Prov.Kep. Babel	Jumlah Materai		
			Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prov.Kep. Babel	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Prov.Kep. Babel	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor		
			Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Prov.Kep. Babel	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara		
			Jumlah tenaga sopir		
	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Prov.Kep. Babel	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Prov.Kep. Babel	Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti		
			Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Prov.Kep. Babel	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan alat tulis kantor	Prov.Kep. Babel	jumlah jenis ATK yang dibeli		
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Prov.Kep. Babel	jumlah barang cetak		
			Jumlah penggandaan		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Prov.Kep. Babel	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prov.Kep. Babel	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Prov.Kep. Babel	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prov.Kep. Babel	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia		
	Penyediaan makan dan minum	Prov.Kep. Babel	Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia		
			Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Prov.Kep. Babel	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan		
			Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prov.Kep. Babel	jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Prov.Kep. Babel	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prov.Kep. Babel	jumlah gedung kantor yang dipelihara		
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Prov.Kep. Babel	jumlah mobil jabatan yang dipelihara		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Oprasional	Prov.Kep. Babel	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Prov.Kep. Babel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Prov.Kep. Babel	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		
			Jumlah BBM Genset		
	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Prov.Kep. Babel	<b>Survey kepuasan pelayanan kepegawaian</b>		
	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Prov.Kep. Babel	jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal		
			Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan		
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Prov.Kep. Babel</b>	<b>Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan</b>		
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Prov.Kep. Babel</b>	<b>Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan)</b>		
	Audit Kinerja dan Keuangan	Prov.Kep. Babel	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur		
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya		
	Review Kinerja dan Keuangan	Prov.Kep. Babel	Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur		
			Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
			Jumlah LHR yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya		
	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Prov.Kep. Babel	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur		
		Prov.Kep. Babel	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
		Prov.Kep. Babel	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya		
	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Prov.Kep. Babel	Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur		
			Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
			Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya		
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Prov.Kep. Babel</b>	<b>Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu meliputi Audit Kinerja dan Keuangan</b>		
	Audit Kinerja dan Keuangan	Prov.Kep. Babel	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigatif		
			Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Pengawasan Lainnya Bidang Investigatif		
3	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Prov. Kep. Babel</b>	<b>Level Capaian Maturitas SPIP</b>		
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Prov.Kep. Babel</b>	<b>Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan</b>		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Prov.Kep. Babel	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pemerintahan dan Aparatur		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Investigatif		
	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Prov.Kep. Babel	Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur		
			Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
			Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya		
		Prov.Kep. Babel	Jumlah Sistem Informasi Pengawasan		
		<b>Prov.Kep. Babel</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan (Bobot 12)</b>		
	<b>Asistensi dan Pendampingan</b>	<b>Prov.Kep. Babel</b>	<b>Persentase Asistensi dan Pendampingan yang dilaksanakan</b>		
	Sub Kegiatan: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Prov.Kep. Babel	Persentase Pengaduan Masyarakat ditindak lanjuti		
	Asistensi dan Pendampingan	Prov.Kep. Babel	Persentase Kepatuhan Laporan e-LHPKN		
			Persentase Kepatuhan Laporan LHKASN		
			Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli		
			Persentase Penyelesaian Laporan dalam Sistem Monitoring Center and Prevention Korsupgah KPK		
			Persentase Penyelesaian Laporan dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (jaga.id)		
			Persentase Capaian Nilai PMPRB Area Penguatan Pengawasan		
			Jumlah unit Kerja yang diusulkan untuk Zona Integritas		
			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP		
			Persentase Tindak Lanjut atas Pengaduan melalui Whistle Blowing System		



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah Laporan Gratifikasi		
			Persentase penyelesaian Kerugian Daerah		

Tabel T-C.32.  
Verifikasi usulan oleh stakeholder dalam FKP RKPD TAHUN 2021

NO	USULAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN PD	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	NAMA PENGUSUL	STAKEHOLDER PENGUSUL	AKOMODIR		KETERANGAN	PD VERIFIKATOR
										YA	TIDAK		
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Publik, Optimalisasi Apip Dalam Pengawasan Pelayanan Publik, Mou Dengan Ombudsman Ri Dalam Hal : (Pengelolaan Pengaduan, Penyelesaian Laporan Masyarakat, Pencegahan Mal-Administrasi)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan (Bobot 12)	Asistensi Dan Pendampingan	Persentase Asistensi Dan Pendampingan Yang Dilaksanakan	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Pangkalpinang	KGS. Chris Fither	Ombudsman RI Perwakilan Babel	Ya		Disetujui	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Publik	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan (Bobot 12)	Asistensi Dan Pendampingan	Persentase Asistensi Dan Pendampingan Yang Dilaksanakan	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Pangkalpinang	KGS. Chris Fither	Ombudsman RI Perwakilan Babel	Ya		Disetujui	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	Optimalisasi Apip Dalam Pengawasan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Obyek Pemeriksaan Yang Dilakukan Pengawasan Internal Meliputi Audit, Review, Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan)	Audit Kinerja Dan Keuangan	7 Kab/Kota	KGS. Chris Fither	Ombudsman RI Perwakilan Babel	Ya		Disetujui	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Mou Dengan Ombudsman Ri Dalam Hal: (Pengelolaan Pengaduan, Penyelesaian Laporan Masyarakat, Pencegahan Mal-Administrasi)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan (Bobot 12)	Asistensi Dan Pendampingan	Persentase Asistensi Dan Pendampingan Yang Dilaksanakan	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Pangkalpinang	KGS. Chris Fither	Ombudsman RI Perwakilan Babel	Ya		Disetujui	Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, telah diamanatkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di tingkat pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Program Prioritas RPJMN 2019-2024 yaitu melanjutkan pembangunan Infrastruktur, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, mengundang investasi seluas-luasnya, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN yang focus dan tepat sasaran. Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan efektif dan efisien.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 pada dasarnya mengacu pada Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah terkait dengan sasaran target kinerja Inspektorat Daerah. Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022, yaitu “**Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan**”

**dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”** dan Misi Kelima yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pembangunan Demokrasi** maka Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2021 difokuskan untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu **Mewujudkan Reformasi Yang Berkualitas**, maka tujuan yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**. Ada 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih

Pada dasarnya, hidup di dalam sistem sosial yang baik dan bersih merupakan espektasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang bersih adalah implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak dinodai oleh tangan-tangan kotor, terjaga dari segala bentuk penyelewengan, baik yang terstruktur maupun tidak, serta tetap berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya. Oleh karena itu menjadi tugas penting Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan internal agar dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Dengan semakin meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih maka otomatis akan berpengaruh pada meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan.

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Sistem pemerintahan yang akuntabel berarti sistem yang tertata dengan rapih, sistematis, memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (*checks and balances*) secara sistemik. Dengan semakin meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel maka secara otomatis dapat menaikkan nilai SAKIP Perangkat Daerah yang pada akhirnya berpengaruh pada meningkatnya Level Capaian Maturitas SPIP.

Sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan diatas menjadi dasar rencana kinerja tahunan Inspektorat Daerah sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.

Rencana Kinerja Tahunan

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

<b>Tujuan:</b> “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”				
No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih	Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan dibawah 5%	<3%	<2%
		Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan (Bobot 12)	6	8
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Level Capaian Maturitas SPIP	3+	3+

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **PERANGKAT DAERAH**

##### **4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dimana sasaran utama dalam Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan, Capaian Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan di bawah 5%, serta level capaian maturitas SPIP. Kedua sasaran ini perlu didukung oleh beberapa program yang kemudian dioperasionalkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Indikator program (outcome) yang direncanakan merupakan kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing Inspektur Pembantu (Irban) pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inspektorat Daerah dalam menyusun rencana kerja tahun 2021 sejalan dengan penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dimana dalam proses perubahan tersebut, dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah juga mengalami penyesuaian.

Program/kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2021, terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 2 (dua) program teknis, 8 (delapan) kegiatan dan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada penyusunan rancangan awal dan rancangan Renja telah disesuaikan pagu dengan

rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dengan total kebutuhan anggaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 sebesar Rp 22.646.537.323,- (dua puluh dua milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih jelas diuraikan sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

##### a) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan
- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
- Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah
- Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

##### b) Kegiatan Administrasi Keuangan

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

##### c) Kegiatan Administrasi Umum

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor



- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Penyediaan bahan logistik kantor
  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - Pengadaan peralatan gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional
  - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- d) Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Formal

## 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

### a) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan:

- Audit Kinerja dan Keuangan
- Review Kinerja dan Keuangan
- Pemantauan Kinerja dan Keuangan
- Evaluasi Kinerja dan Keuangan

### b) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

- Audit Kinerja dan Keuangan

## 3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

### a) Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan

Sub Kegiatan:

- Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan
- Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan

b) Asistensi dan Pendampingan

Sub Kegiatan:

- Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
- Asistensi dan Pendampingan

Merebaknya wabah Covid-19 sejak akhir tahun 2019 sampai dengan akhirnya Pemerintah pusat menetapkan kejadian ini sebagai pandemi nasional. Hal ini kemudian diikuti dengan langkah tegas pemerintah mengeluarkan instruksi bagi seluruh Kementerian /Lembaga di Pusat dan Daerah termasuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan *refocussing*/re-alokasi anggaran tahun berjalan (tahun 2020) sebagai upaya penanganan Covid-19 dan bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Program penanganan dan pemulihan ekonomi dampak dari Covid-19 ini akan terus berlanjut hingga tahun 2021. Hal ini secara otomatis berdampak pada penyesuaian pagu indikatif seluruh perangkat daerah, termasuk penyesuaian terhadap pagu anggaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk perencanaan pendanaan (penganggaran) tahun 2021. Perencanaan maju untuk penganggaran tahun 2022 tetap disesuaikan dengan kebutuhan yang seharusnya, namun apabila dalam pelaksanaannya akan dilakukan *refocussing*/re-alokasi maka Inspektorat Daerah akan tetap melakukan penyesuaian-penyesuaian lebih lanjut terkait hal tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel T-C.33. di bawah ini.

Tabel T-C.33.  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Inspektorat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>22.646.537</b>				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Nilai SAKIP PD</b>	<b>Pkpinang</b>	<b>80</b>	<b>20.306.537</b>	<b>APBD</b>		<b>85</b>	<b>22.319.200</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pkpinang	14 dokumen	272.000	APBD		14 dokumen	535.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dok perencanaan Renstra/Renja PD	Pkpinang	2 dokumen	80.000	APBD		2 dokumen	160.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen	Jumlah dokumen DPA/DPPA yang tersusun	Pkpinang	4 dokumen	40.000	APBD		4 dokumen	65.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi PD	Pkpinang	4 dokumen	24.000	APBD		4 dokumen	100.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen kesepakatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD	Pkpinang	1 dokumen	80.000	APBD		1 dokumen	150.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD	Pkpinang	3 dokumen	48.000	APBD		3 dokumen	60.000
		<b>Survey Kepuasan Pelayanan Internal</b>	<b>Pkpinang</b>	<b>95</b>	<b>20.034.537</b>	<b>APBD</b>		<b>95</b>	<b>21.781.050</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan</b>	<b>Survey Kepuasan Pelayanan Keuangan</b>	<b>Pkpinang</b>	<b>95</b>	<b>17.672.000</b>			<b>95</b>	<b>18.582.000</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Pkpinang	88 orang	17.640.000	APBD		88 orang	18.522.000
	Sub Kegiatan Penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/Semesteran	Pkpinang	14 laporan	20.000	APBD		14 laporan	30.000
	Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Pkpinang	1 laporan	12.000	APBD		1 laporan	30.000
	<b>Kegiatan Administrasi Umum</b>	<b>Survey Kepuasan Pelayanan Internal</b>	<b>Pkpinang</b>	<b>95</b>	<b>2.242.537</b>			<b>95</b>	<b>2.949.050</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Surat/Barang yang dikirim	Pkpinang	300 Surat/Barang yang dikirim	16.000	APBD		400 Surat/Barang yang dikirim	30.000
		Jumlah Materai	Pkpinang	4500 Lembar	7.440	APBD		4750 Lembar	10.000
		Jumlah tenaga pramubakti yang dipekerjakan	Pkpinang	7 orang	263.900	APBD		7 orang	263.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel, virtual meeting yang dibayarkan	Pkpinang	12 bulan	170.377	APBD		12 bulan	260.000
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pkpinang	45 kali	40.000	APBD		50 kali	95.000
		Jumlah tenaga keamanan/satpam kantor yang dipekerjakan	Pkpinang	4 orang	150.800	APBD		4 orang	150.800
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Pkpinang	4 unit	12.000	APBD		4 unit	15.000
		Jumlah tenaga sopir yang dipekerjakan	Pkpinang	1 orang	37.700	APBD		1 orang	37.700
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja	Pkpinang	12 orang	44.200	APBD		12 orang	55.250
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan/pramubakti	Pkpinang	7 orang	263.900	APBD		7 orang	263.900
		Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan kantor yang tersedia	Pkpinang	70 Jenis	40.000	APBD		70 Jenis	50.000
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Pkpinang	79 Jenis	40.000	APBD		85 Jenis	50.000
	Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	Pkpinang	85 jenis	80.000	APBD		90 jenis	100.000
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak	Pkpinang	13 eksemplar	28.000	APBD		20 eksemplar	35.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah penggandaan	Pkpinang	15000 lembar	5.250	APBD		15000 lembar	5.250
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Pkpinang	30 Jenis	16.000	APBD		40 Jenis	20.000
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Pkpinang	40 jenis	80.000	APBD		50 jenis	100.000
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Pkpinang	1 unit	2.000	APBD		1 unit	2.000
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	Pkpinang	5 eksemplar	16.000	APBD		5 eksemplar	20.000
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Pkpinang	1 unit	20.000	APBD		1 unit	25.000
	Sub Kegiatan Penyediaan makan dan minum	Jumlah makan dan minum Tamu yang tersedia	Pkpinang	36 Pax	49.920	APBD		36 Pax	62.400
		Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	Pkpinang	48 Pax	64.000	APBD		48 Pax	80.000
	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	Pkpinang	36 kali	280.000	APBD		36 kali	400.000
		Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dilaksanakan	Pkpinang	36 kali	80.000	APBD		36 kali	200.000
	Sub Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Pkpinang	14 jenis	40.000	APBD		14 jenis	50.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Pkpinang	12 jenis	20.000	APBD		12 jenis	25.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pkpinang	2 unit	80.000	APBD		2 unit	100.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Pkpinang	1 unit	24.000	APBD		1 unit	30.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Pkpinang	1 unit	92.000	APBD		1 unit	115.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Pkpinang	60 unit	40.000	APBD		60 unit	50.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pkpinang	36 unit	60.000	APBD		36 unit	140.000
		Jumlah BBM Genset	Pkpinang	750 liter	7.200	APBD		750 liter	250.000
	<b>Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Survey kepuasan pelayanan kepegawaian</b>	<b>Pkpinang</b>	<b>95</b>	<b>191.850</b>	<b>APBD</b>		<b>95</b>	<b>325.000</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal	Pkpinang	88 orang	120.000	APBD		88 orang	250.000
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai ASN yang ikut Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Pkpinang	88 orang	71.850	APBD		88 orang	75.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan</b>	<b>Pkpinang</b>	<b>&lt;5%</b>	<b>1.480.000</b>	<b>APBD</b>			<b>3.000.000</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan internal meliputi Audit, Review, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Keuangan)</b>	<b>Pkpinang</b>	<b>100%</b>	<b>1.280.000</b>				<b>2.600.000</b>
	Sub Kegiatan Audit Kinerja dan Keuangan		Pkpinang		376.000	APBD			775.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Pkpinang	40 laporan	120.000	APBD		40 laporan	250.000
		Jumlah LHP yang dihasilkan wilayah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pkpinang	40 laporan	136.000	APBD		40 laporan	275.000
		Jumlah LHP yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Pkpinang	40 laporan	120.000	APBD		40 laporan	250.000
	Sub Kegiatan Pemantauan Kinerja dan Keuangan		Pkpinang		364.000	APBD			625.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Pkpinang	20 laporan	120.000	APBD		30 laporan	200.000
		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pkpinang	20 laporan	124.000	APBD		30 laporan	225.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Pkpinang	20 laporan	120.000	APBD		30 laporan	200.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Pkpinang	12 laporan	60.000	APBD		12 laporan	100.000
		Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pkpinang	13 laporan	60.000	APBD		13 laporan	100.000
		Jumlah LHE yang dihasilkan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Pkpinang	13 laporan	60.000	APBD		13 laporan	100.000
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Obyek Pemeriksaan yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu meliputi Audit Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pkpinang</b>	<b>100%</b>	<b>200.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>400.000</b>
	Sub Kegiatan Audit Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigatif	Pkpinang	100%	100.000	APBD		100%	200.000
		Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan Pengawasan Lainnya Bidang Investigatif	Pkpinang	100%	100.000	APBD		100%	200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Level Capaian Maturitas SPIP</b>	<b>Pkpinang</b>	<b>3</b>	<b>240.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>425.000</b>
	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan</b>	<b>Pkpinang</b>	<b>100%</b>	<b>80.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>100.000</b>
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Pkpinang	2 dokumen	20.000	APBD		2 dokumen	25.000
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pkpinang	2 dokumen	20.000	APBD		2 dokumen	25.000
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Pkpinang	2 dokumen	20.000	APBD		2 dokumen	25.000
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan Bidang Investigatif	Pkpinang	2 dokumen	20.000	APBD		2 dokumen	25.000
	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Pkpinang	12 dokumen	20.000	APBD		12 dokumen	50.000
		Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pkpinang	12 dokumen	20.000	APBD		12 dokumen	50.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Pkpinang	12 dokumen	20.000	APBD		12 dokumen	50.000
		Jumlah Sistem Informasi Pengawasan	Pkpinang	1 aplikasi	100.000	APBD		1 aplikasi	175.000
		<b>Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan (Bobot 12)</b>	<b>Pkpinang</b>	<b>6</b>	<b>620.000</b>	<b>APBD</b>		<b>7</b>	<b>985.000</b>
	<b>Kegiatan Asistensi dan Pendampingan</b>	<b>Persentase Asistensi dan Pendampingan yang dilaksanakan</b>	<b>Pkpinang</b>	<b>100%100</b>	<b>620.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>985.000</b>
	Sub Kegiatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat ditindak lanjuti	Pkpinang	100%	120.000	APBD		100%	200.000
	Sub Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Persentase Kepatuhan Laporan e-LHPKN	Pkpinang	100%	80.000	APBD		100%	100.000
		Persentase Kepatuhan Laporan LHKASN	Pkpinang	100%	80.000	APBD		100%	100.000
		Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli	Pkpinang	2 laporan	80.000	APBD		2 laporan	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/sub kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Penyelesaian Laporan dalam Sistem Monitoring Center and Prevention Korsupgah KPK	Pkpinang	100%	20.000	APBD		100%	50.000
		Persentase Penyelesaian Laporan dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (jaga.id)	Pkpinang	100%	20.000	APBD		100%	50.000
		Persentase Capaian Nilai PMPRB Area Penguatan Pengawasan	Pkpinang	85%	20.000	APBD		85%	50.000
		Jumlah unit Kerja yang diusulkan untuk Zona Integritas	Pkpinang	2 unit	20.000	APBD		2 unit	50.000
		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Pkpinang	34 PD	40.000	APBD		34 PD	60.000
		Persentase Tindak Lanjut atas Pengaduan melalui Whistle Blowing System	Pkpinang	100%	20.000	APBD		100%	50.000
		Jumlah Laporan Gratifikasi	Pkpinang	4 laporan	20.000	APBD		4 laporan	50.000
		Persentase penyelesaian Kerugian Daerah	Pkpinang	20%	100.000	APBD		25%	125.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Catatan Penting**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan tujuan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah secara efektif dan efisien. Di samping itu Renja ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2021.

#### **B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 dan 2020;
- 2) Memperhatikan masalah yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 dan 2020;
- 3) Memperhatikan sumber daya yang dimiliki dan yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- 4) Memperhatikan sasaran, tujuan dan target dari tiap indikator yang telah ditetapkan dan harus dicapai;
- 5) Memperhatikan keberlanjutan program yang terdapat pada Renstra Inspektorat Daerah selama 5 (lima) tahun, untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

#### **C. Rencana Tindak Lanjut**

Untuk mengantisipasi target yang tidak tercapai atau bahkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi tersebut terdiri dari pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana kerja. Evaluasi terhadap hasil rencana kerja dilaksanakan secara periodik setiap triwulanan terkait program/kegiatan, kinerja dan anggaran, permasalahan dan faktor pendorong dan penghambat serta rencana tindak lanjut yang diperlukan.

Pangkalpinang, Juli 2020  
INSPEKTUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUSANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196306121985031001



Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam  
Telepon (0717) 434693, 4262686 Pangkalpinang 33418 email: [inspektoratbabel@gmail.com](mailto:inspektoratbabel@gmail.com)